



*Jurnal Penelitian*

**POLITIK**

Vol.14, No.1, Juni 2017

# TRANSFORMASI IDENTITAS KEINDONESIAAN

- Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru
- Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia
- Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) dalam Pemilu Pilkada DKI 2012
- Peranakan dan Serat Kekancangan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta
- Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan

## RESUME PENELITIAN

- Peran Kerja sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN
- Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan

## REVIEW BUKU

- Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 14	No. 1	Hlm. 1-108	Jakarta, Juni 2017	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal  
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

**Dewan Redaksi**

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Esty Ekawati, S.IP., M.IP  
Devi Darmawan, SH

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

1829-8001  
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

## Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	i
<b>Catatan Redaksi</b>	iii
<b>Artikel</b>	
• <b>Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru</b> Aisah Putri Budiatri	1–15
• <b>Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia</b> Wasisto Raharjo Jati	17–29
• <b>Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI): dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012</b> Dina Fadiyah	31–44
• <b>Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta</b> Septi Satriani	45–54
• <b>Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan</b> Siswanto	55–68
<b>Resume Penelitian</b>	
• <b>Peran Kerja Sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN</b> Sandy Nur Ikfal Raharjo, dkk	69–83
• <b>Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan</b> Siswanto, dkk	85–98
<b>Review Buku</b>	
• <b>Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan</b> Anggi Afriansyah	99–106
<b>Tentang Penulis</b>	107–108
<b>Pedoman Penulisan</b>	109–113

## CATATAN REDAKSI

Arus Globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perubahan tersebut bisa bernilai positif jika globalisasi dimaknai secara bijak. Namun tak sedikit dampak negatif ditimbulkan oleh globalisasi akibat ketidakmampuan kita dalam memaknai dan menanggapi secara bijak. Indonesia, tak lepas dari arus globalisasi ini sehingga pola-pola perilaku masyarakat di segala aspek kehidupan pun bergeser. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergeseran identitas manusia baik itu akibat sosial-budaya maupun politik.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan identitas Keindonesiaan. Artikel pertama yang ditulis oleh Aisah Putri Budiatri, ”Dikotomi Identitas Keindonesiaan Dan Kepapuaan Pasca Orde Baru”, memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Artikel berikutnya, “Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia”. Artikel yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati ini membahas mengenai kelas menengah yang menjadi aktor baru dan menjadi identitas tersendiri dalam demokrasi di Indonesia. Tulisannya membahas mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Dan sejauh mana mereka ikut andil dalam proses demokratisasi di ruang publik. Sementara itu, artikel “Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara Dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012” yang ditulis oleh Dina Fadiah menawarkan diskusi mengenai relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-

Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas menjadi identitas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

Pergeseran identitas juga terjadi di Kraton Yogyakarta yang dibahas dalam artikel “Peranakan Dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta” yang ditulis oleh Septi Satriani. Artikel ini membahas bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Artikel terakhir membahas tentang “Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan” yang ditulis oleh Siswanto. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan

bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Selain kelima artikel terkait identitas di atas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama ditulis oleh Sandy Nur Iqbal Raharjo, “Peran Kerja Sama IMT-GT Dalam Pembangunan Konektivitas Asean”. Tulisan ini menganalisis arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim.

Artikel kedua, “Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan”, ditulis oleh Siswanto. Artikel ini mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerjasama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (asymmetric power relations) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (bargaining position) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (nasional power) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia

sebagai negara kekuatan menengah (middle power) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Fathur Rokhman & Surahmat “Bahasa Sebagai Arena Dan Instrumen Kekuasaan”. Review yang ditulis Anggi Afriansyah menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai identitas Keindonesiaan. Selamat membaca.

## **Redaksi**

## Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

---

**DDC: 320.54 : 352.14**

**Aisah Putri Budiatri**

### **DIKOTOMI IDENTITAS KEINDONESIAAN DAN KEPAPUAAN PASCA ORDE BARU**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 1-15**

Narasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

**Kata kunci:** identitas, Papua, kepapuaan, keindonesiaan, konflik, paska Orde Baru

---

**DDC: 305.5**

**Wasisto Raharjo Jati**

### **MEMAKNAI KELAS MENENGAH SEBAGAI AKTOR DEMOKRASI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 17-29**

Tulisan ini hendak menganalisis mengenai kelas menengah sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Membicarakan kelas menengah dalam setiap diskursus ilmu sosial dan politik di Indonesia senantiasa dihadapkan pada pembahasan ekonomi secara kuantitatif. Hal yang perlu dicatat adalah keberadaan kelas menengah ini daripada didefinisikan lebih baik dirasakan keberadaannya dalam kehidupan. Posisi kelas menengah sebagai aktor politik di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan kemunculan kelas menengah dalam arus demokrasi Indonesia yang masih ambigu. Kelas menengah ini bisa menjadi kelompok masyarakat yang ter subordinasi dengan negara, namun di satu sisi, kelas menengah juga tampil sebagai kelas masyarakat yang resisten dengan negara. Adanya transisi posisi dan status kelas menengah tersebut sebenarnya bisa disimak dari gerakan reformasi 1998 hingga sekarang ini. Munculnya berbagai macam gerakan politik dengan mengarustamakan demokrasi yang diinisiasi oleh kelas menengah menjadi hal yang terelakkan pasca reformasi ini. Semula, gerakan tersebut hanya berupa aksi penyampaian aspirasi dan kini sudah berkembang menjadi menjadi aksi penuntutan representasi. Adanya perubahan dalam pilihan aksi dan strategi itu menandakan bahwa kesadaran politik di kalangan kelas menengah Indonesia sendiri sudah semikian merata. Mereka tidak hanya menjadi aktor pasif secara politis namun juga aktif dalam menyuarakan aspirasi dan sekaligus pula representasinya. Menguatnya aksi representasi dari kelas menengah ini merupakan implikasi penting semakin menguatnya ranah societal terhadap

proses political, dan semakin berperannya netizen dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana mereka andil dalam proses demokratisasi di ruang publik.

**Kata kunci:** Demokratisasi, Kelas Menengah, Masyarakat

---

**DDC: 324.6**

**Dina Fadiyah**

**KUASA MERAH SUARA: RELASI  
FOKE-NARA DAN FORUM  
KOMUNIKASI ANAK BETAWI  
(FORKABI) DALAM PEMILUKADA  
DKI JAKARTA 2012**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 31-44**

Tulisan ini bermaksud melihat relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilu DKI Jakarta 2012. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-mana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

**Kata kunci:** Ormas, Forkabi, Patron, Klien

---

**DDC: 302.3**

**Septi Satriani**

**PERANAKAN DAN SERAT  
KEKANCINGAN: SEBUAH  
IDENTITAS ABDI DALEM KRATON  
YOGYAKARTA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 45-54**

Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

**Kata kunci :** Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan

---

**DDC: 320.509598**

**Siswanto**

**TRANSFORMASI PANCASILA DAN  
IDENTITAS KEINDONESIAAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 55-68**

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin lama semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi

atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

**Kata kunci:** Globalisasi, Identitas Keindonesiaan, Transformasi Pancasila

---

**DDC: 327**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo**

### **PERAN KERJA SAMA IMT-GT DALAM PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS ASEAN**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 69-83**

*Indonesia-Malaysia—Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang diakui oleh ASEAN berperan penting dalam membangun konektivitas ASEAN. Namun demikian, perbedaan karakter geografis dan perbedaan kepentingan antartiga negara anggotanya berpeluang menghambat implementasi IMT-GT dalam membangun konektivitas tersebut. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yaitu arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim. Melalui metode kualitatif bersifat deskriptif korelatif, studi ini menemukan bahwa IMT-GT berkontribusi hampir 50% bagi perekonomian Malaysia, mendukung visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia, serta mendorong kemajuan wilayah Thailand Selatan yang relatif tertinggal. Temuan lainnya, capaian program IMT-GT 2012-2016 masih rendah, terutama di sisi Indonesia akibat terlalu banyaknya program yang dicanangkan. Terakhir, IMT-GT berperan dalam membangun konektivitas ASEAN melalui pengembangan lima koridor ekonomi, walaupun masih lebih dominan pada dimensi darat dibanding dimensi maritim.

**Kata kunci:** ASEAN, IMT-GT, konektivitas, dan maritim

---

**DDC: 327.51**

**Siswanto**

### **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK: MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL DI TENGAH KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 85-98**

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembarakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (*asymmetric power relations*) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (*nasional power*) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan. Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.

**Kata kunci:** Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional

---

**DDC: 302.222**

**Anggi Afriansyah**

**BAHASA SEBAGAI ARENA DAN  
INSTRUMEN KEKUASAAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 99-106**

Buku ini menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

**Kata kunci:** bahasa, politik, kekuasaan, Indonesia

---

**DDC: 320.54 : 352.14**

**Aisah Putri Budiatri**

## **THE DICHOTOMY OF INDONESIAN AND PAPUAN IDENTITIES IN THE POST-NEW ORDER ERA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 1-15**

*The narratives about the dichotomy of Indonesian and Papuan identities are almost founded in every analysis of Papuan political identity. The previous research emphasis on the discussion about the Dutch colonial experience, the history of Papua's integration into Indonesia and the failure of development under New Order era as the key reasons for the genesis of the dichotomy. The colonial periode and New Order era have become their research focus since the Papuan identity as an antithesis of Indonesian-ness was born and grew under this political period. Then, how is about the political identities in Papua under Post-New Order? This article shows that the antithesis dichotomy between Papuan and Indonesian identities still occurs, even though several policies to resolve the conflict, including the Special Autonomy Law, have been implemented. In fact, the dichotomy of identities in Papua has sharpened and potentially worsened the conflict.*

**Keywords:** *identity, Papua, Papuan-ness, Indonesian-ness, conflict, post-New Order*

---

**DDC: 305.5**

**Wasisto Raharjo Jati**

## **UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY**

## **PILLAR IN INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 17-29**

*This article is aims to analyse middle class as one of the main actors in Indonesian democratization process. Discussion on middle class studies in Indonesian social and political science discourse have been dominated economic understanding based quantitative method. It was an academic challenges for Indonesian social scientist to redefine terminology of middle class. The position of middle class as the political actor in Indonesia still fluctuated due to unclearly standing in terms of relation state and society. On one hand, the middle class could perform as resistant groups against the political regime. In other hand, the Indonesian middle class presumably become subordinated groups towards the political regime. It can be indicated in Indonesia post Authoritarian era, the middle class groups performs itself as the political initiator from grass roots level. That main motivation from Indonesian middle class in recent political era are make alternative representation in order to articulate aspiration. The emergence of internet especially social media have been perceived as political machine that stimulated middle class to make critical points toward government today.*

**Keyword:** *Democratization, Middle Class, Society.*

---

**DDC: 324.6**

**Dina Fadiyah**

## **UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY PILLAR IN INDONESIA**

*This paper intends to see the relationship between Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) with Forkabi in Jakarta 2012 Election. Basically, Forkabi stand up because they felt treat from immigrants. Forkabi originally founded on ethnicity but later transformed into a political extension of a local elite. CSOs that were supposed to be free of political interests, became the political extension of Foke-Nara during the campaign period in the 2012 Jakarta Governor election. This paper uses descriptive qualitative method and found that community organizations can play an important role in a local election. Proven with the local elites are currently aggressively used organizations as the tim to win the election. The success of this case because members of mass organizations are widespread everywhere. Starting from the level of RT, RW, Village, District, etc. This proves that the existing mass organizations can not be independent or do not have political interest.*

**Keywords:** Mass Organization, Forkabi, Patron, Client.

---

**DDC: 302.3**

**Septi Satriani**

**PERANAKAN AND SERAT  
KEKANCINGAN: AN IDENTITY OF  
“ABDI DALEM” IN YOGYAKARTA  
PALACE**

*This paper focus on how the concept of peranakan and serat kekancingan became the identity of abdi dalem of Kraton Yogyakarta. Peranakan is not just a uniform but the symbol of brotherhood and control of behavior. I assume that the peranakan and serat kekancingan is a symbol of identity. When the abdi dalem wearing a peranakan and having serat kekancingan,, they will behave according to the value that contained by them.*

**Keywords:** Identity, Abdi Dalem in Yogyakarta Palace, Peranakan, Serat Kekancingan

---

**DDC: 320.509598**

**Siswanto**

**THE TRANSFORMATION OF  
PANCASILA AND INDONESIAN  
IDENTITY**

*The ideology of Pancasila as the basis of the state and the worldview is increasingly abandoned by the Indonesian nation. Pancasila as a reference of political and social life is weakening in the midst of globalization that influence the mindset and behavior of the Indonesian people. Therefore, the people of Indonesia move to the condition that they lost of Indonesian Identity. This paper sees the importance of discourse about transformation of Pancasila, so that it is expected to be a solution to the challenge of nationality. Transfromasi Pancasila can be done through (1) Transformation is holistic, can not be partial. (2) Transformation also involves about changing the mindset of the community. (3) This transformation also needs to be grounded by the light of science.*

**Keywords:** Globalization, Indonesia Identity, Transformation of Pancasila

---

**DDC: 327**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo**

**THE ROLE OF IMT-GT  
COOPERATION IN THE ASEAN  
CONNECTIVITY DEVELOPMENT**

*Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) is recognized as one of the sub-regional cooperation to support ASEAN Community. However, geographical character differences and consequently creating different interests among three member states, is likely to hinder the implementation of the IMT-GT in establishing such connectivity. This study focuses on three issues, namely, the significance of IMT-GT for each member state, implementation of IMT-GT's programs in 2012-*

2016, and the role of IMT-GT in building ASEAN connectivity, particularly in the maritime sector. Through correlative descriptive qualitative method, this study found that the IMT sub-region contributes nearly 50% for the Malaysian economy, supports the Indonesian vision of Global Maritime Fulcrum for Indonesia, as well as encourages the development of less-developed Southern Thailand region. In Addition, the implementation of IMT-GT's programs in 2012-2016 was still low, especially on the side of Indonesia due to too many programs were planned. Another finding was that IMT-GT has played significant role in building the ASEAN connectivity through the development of five economic corridors, although it was still more on land connectivity rather than maritime connectivity.

**Keywords:** ASEAN, IMT-GT, connectivity, and maritime

---

**DDC: 327.51**

**Siswanto**

**INDONESIAN FOREIGN POLICY  
TOWARD CHINA:  
FIGHTING THE NATIONAL  
INTERESTS IN ASYMMETRIC  
POWER RELATIONS**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 85-98**

*This paper would like to describe Indonesia's foreign policy towards China in the Reform period. As we known that Indonesia-China bilateral relations have been going on since the 1950s. The relations have ups and downs condition in accordance with the dynamics of domestic politics of each country. It is exciting that in Reform period that bilateral cooperation has been increasing especially in the field of politics and economy. In other hand, there is obstacle in this bilateral cooperation. The cooperation based on imbalance power relation (asymmetric power relations) which will affect to the bargaining position of each country in struggling for national interests. China as a nation with greater national power will be easier in fighting for its national interests compared to Indonesia as a country with smaller national power. To solve the obstacle, Indonesia's position as a middle power country can be a strategic instrument in facing China. Position as an middle power is based on a number of identifications of its capacity and political behavior in international relations*

*such as ; a diplomatic initiator in realizing stability / security and peace in the region. Finally, in closing remark that this paper is expected to give input to the direction of Indonesian foreign policy towards China so that it has more bargaining position in fighting its national interests against China in the midst of imbalance power (asymmetric power relations)*

**Keywords:** Foreign policy, power imbalance, national interest

---

**DDC: 302.222**

**Anggi Afriansyah**

**LANGUAGE AS FIELD AND  
INSTRUMENTS OF POWER**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 99-106**

*This book examines the use of language in variety aspects of life. Language is not only used as a medium of communication but more than that, can be an effective tool to gain power. Language operates as an instrument of power and successfully utilized optimally by those who have the intention to to get power. Language can be used to dominate others, means of struggle, preserve power, won the election, and achieve economic benefits.*

**Keywords:** Language, politic, power, Indonesia

# TRANSFORMASI PANCASILA DAN IDENTITAS KEINDONESIAAN

## *THE TRANSFORMATION OF PANCASILA AND INDONESIAN IDENTITY*

**Siswanto**

Pusat Penelitian Politik- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Email: sish\_jakarta@yahoo.com

Diterima: 15 Maret 2017; direvisi: 2 April 2017; disetujui: 6 Juni 2017

### **Abstract**

*The ideology of Pancasila as the basis of the state and the worldview is increasingly abandoned by the Indonesian nation. Pancasila as a reference of political and social life is weakening in the midst of globalization that influence the mindset and behavior of the Indonesian people. Therefore, the people of Indonesia move to the condition that they lost of Indonesian Identity. This paper sees the importance of discourse about transformation of Pancasila, so that it is expected to be a solution to the challenge of nationality. Transformation of Pancasila can be done through (1) Transformation is holistic, can not be partial. (2) Transformation also involves about changing the mindset of the community. (3) This transformation also needs to be grounded by the light of science.*

**Keywords:** Globalization, Indonesia Identity, Transformation of Pancasila

### **Abstrak**

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin lama semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu dilandasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

**Kata kunci:** Globalisasi, Identitas Keindonesiaan, Transformasi Pancasila

### **Pendahuluan**

Seperti diketahui bahwa tahun 1998 telah terjadi peristiwa bersejarah bagi Indonesia. Pada saat itu Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dipaksa turun oleh rakyat Indonesia. Hal ini terjadi berkenaan dengan krisis keuangan yang terjadi secara sistematis lalu meruntuhkan struktur ekonomi nasional yang memang rentan terhadap imbas fluktuasi ekonomi global. Krisis keuangan ini tidak hanya melanda Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di Asia, seperti: Thailand, Korea Selatan,

dan Malaysia. Hanya saja krisis yang terjadi di negara-negara tersebut tidak separah di Indonesia. Dampak dari krisis ini, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS mengalami penurunan signifikan yaitu dari Rp2.500 menjadi Rp11.000 untuk per satu dollar AS.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> SEAsite Indonesia, "Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak Terlupakan," [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis\\_ekonomi.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis_ekonomi.htm), 1998, diakses pada tanggal 20 Februari 2017

Keguncangan ekonomi nasional mendorong terjadinya krisis multidimensi yang kompleks yaitu berdimensi sosial, politik, hukum, budaya, dan agama.<sup>2</sup> Dalam dimensi politik ditandai oleh upaya rakyat berjuang bersama-sama untuk terwujudnya reformasi pembaruan. Dinamika politik berjalan cepat dan berubah menjadi aksi anarkhi dan kekerasan rasial di sejumlah wilayah di Jakarta. Puncaknya terjadi ketika rakyat dan mahasiswa turun ke jalan dan menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) setelah sebelumnya terjadi beberapa bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Kondisi sosial politik yang kacau ini diperparah oleh aksi politik beberapa orang menteri pendukung Presiden Soeharto yang berubah haluan dan meninggalkan dirinya. Akibat dari ketidakpastian sistem politik dan keamanan ini, pada 21 Mei 1998 Presiden Suharto mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Habibie.<sup>3</sup>

Sementara itu, semasa Presiden Soeharto berkuasa fungsi Pancasila sebagai alat kepentingan politik pemerintah. Pada masa itu Pancasila dan UUD 45 tidak pernah diamalkan secara sungguh-sungguh.<sup>4</sup> Pemerintah Suharto membangun struktur pemerintahan otoriter dan melanggar HAM, tetapi menamakannya demokrasi Pancasila. Dia juga mengembangkan sistem ekonomi Liberal, tetapi menyebutnya sistem ekonomi Pancasila. Jadi, pada saat itu telah terjadi distorsi atas eksistensi Pancasila.

Konsekuensinya, masyarakat Indonesia di era Reformasi kurang antusias untuk mempelajari dan mengamalkannya. Apalagi setelah Orde Baru lengser, Pancasila seperti “barang antik” yang sudah dimasukkan ke dalam “museum.” Pancasila tidak lagi eksis dalam kehidupan masyarakat, namun belakangan ini ada kesadaran untuk kembali menghadirkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

<sup>2</sup> Musa Asy'arie, *Keluar dari Krisis*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2001), hlm. xxxiv.

<sup>3</sup> Muridan S. Widjojo (ed), *Penakluk Rejim Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 175

<sup>4</sup> Muridan S. Widjojo, “Wacana Politik Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998.” dalam Muridan S. Widjojo (ed), *Penakluk Rejim Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 248-249

Senada dengan hal itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mensinyalir sekarang ini rakyat sudah meninggalkan Pancasila. Perilaku rakyat Indonesia sudah tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Di lingkungan MPR ada kegelisahan memandang eksistensi Pancasila karena MPR merupakan pengawal dari empat pilar yaitu Pancasila, UUD1945, Bhinneka Tunggal Eka, dan NKRI. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai berikut:

“Kalau seluruh rakyat Indonesia mau memegang Pancasila, niscaya Indonesia akan menjadi negara maju. Sayangnya saat ini justru kebanyakan kita malah meninggalkan Pancasila,”

“... kalau bangsa Indonesia memegang teguh Pancasila, maka negara akan aman dan damai. Karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang digali dari bumi Indonesia sendiri.”

“Kalau kita bersengketa, Pancasila mengajarkan musyawarah untuk mufakat. Kalau ada rakyat kesusahan, sakit, kelaparan atau tidak bisa sekolah Pancasila mengamankan keadilan sosial.”<sup>5</sup>

Masalahnya memang secara *de facto* sulit dipungkiri suatu kenyataan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup semakin ditinggalkan, di lain pihak nilai-nilai luar akibat globalisasi semakin memengaruhi pola pikir dan perilaku rakyat Indonesia. Artinya fungsi Pancasila sebagai filter nilai-nilai kehidupan sudah tidak efektif. Di lain pihak informasi dan nilai-nilai dari dunia luar semakin intensif hadir di tengah-tengah rakyat karena di era globalisasi atau dalam konteks *Global Village* seperti sekarang ini terjadinya interaksi informasi dan ide adalah suatu keniscayaan,<sup>6</sup> sesuatu yang hampir tidak mungkin untuk dihindari atau suatu yang tidak terelakkan. Ide-ide tentang Liberalisme, Hedonisme, dan Radikalisme berinteraksi dengan rakyat Indonesia dan membawa konsekuensi

<sup>5</sup> Niken Widya Yunita, , “Ketua MPR Bicara Soal Pancasila yang Mulai Ditinggalkan,” 29 April 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3487755/ketua-mpr-bicara-soal-pancasila-yang-mulai-ditinggalkan>, diakses pada 20 Mei 2017.

<sup>6</sup> Emil Salim, “Indonesian Science Fund and Research Agenda,” makalah *keynote speaker* disampaikan pada Seminar tentang *Globalisasi*, tahun 2012 di Jakarta.

tersendiri kepada pola pikir dan perilaku mereka sehingga identitas keindonesiaan yang selama ini menjadi ciri bangsa Indonesia seperti; nilai-nilai gotong royong, toleransi, musyawarah, kekeluargaan, dan saling menghormati yang mengkristal dalam Pancasila akan terdistorsi oleh nilai-nilai yang datang dari luar tersebut.

Guna menghindari hal tersebut di atas, rakyat perlu dibekali suatu instrumen strategis yaitu pegangan ideologi yang mengakar di bumi Indonesia agar berfungsi menjadi filter dalam berinteraksi dengan nilai-nilai luar. Demi mewujudkan adanya filter tersebut, upaya transformasi fungsi dan pengamalan ideologi Pancasila. Hal ini dilakukan dengan mengkaji kembali fungsi dan sistem pengamalan Pancasila melalui pemanfaatan dimensi fleksibilitas dari ideologi Pancasila.

Selanjutnya, tujuan penulisan artikel ini sebagai upaya untuk memecahkan masalah<sup>7</sup> dalam hal ini masalah krisis eksistensi nilai-nilai Pancasila yang sedang melanda bangsa Indonesia karena disinyalir seperti tersebut di atas bangsa Indonesia sudah meninggalkan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, upaya-upaya mewacanakan transformasi terhadap eksistensi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila agar kembali menjadi dasar negara dan pandangan hidup. Selama era reformasi atau selama hampir dua dekade masyarakat Indonesia asing terhadap keberadaan Pancasila. Kondisi ini sesuatu yang ironis karena Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup masyarakat yang susah payah dirumuskan oleh pendiri negara. Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan terlalu lama dan berlarut-larut sehingga Pemerintah punya tanggungjawab politik untuk melakukan langkah-langkah strategis guna mengembalikan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan dinamika yang terjadi dewasa ini.

Wacana transformasi pengamalan Pancasila ini diharapkan punya dampak strategis Pemerintah Indonesia dan masyarakat. (1) Dampak strategis untuk Pemerintah, Pemerintah Indonesia selama era Reformasi kurang menyadari bawah Pancasila adalah dasar negara. Keberadaan Pancasila

sebagai dasar negara NKRI adalah sangat menentukan keberlanjutan NKRI ke depan. Mengabaikan dasar negara berarti mengabaikan keberlanjutan atau eksistensi Indonesia ke depan. Jika Pancasila dianalogikan dengan rumah, Pancasila adalah pondasi rumah sehingga pihak yang membiarkan Pancasila dilupakan masyarakat berarti membiarkan rumah tersebut ambruk dan rumah besar itu adalah Indonesia. (2) Dampak strategis untuk masyarakat, transformasi pengamalan Pancasila diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk kembali menyadari bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup yang diwariskan oleh pendiri bangsa. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya agar kembali berfungsi menjadi nilai-nilai dasar dalam interaksi sosial di level nasional maupun internasional, rujukan dalam merespons arus globalisasi dan pilar besar pemersatu bangsa.

### **Transformasi Sebagai Strategi Mengubah Cara Pandang Masyarakat Terhadap Pancasila**

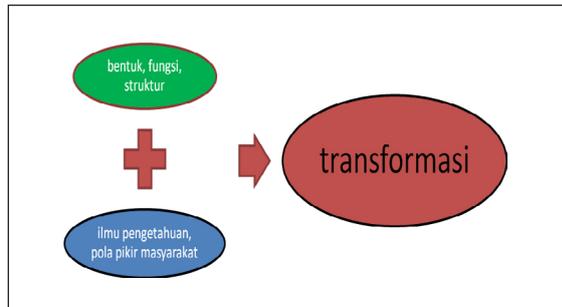
Konsep transformasi salah satunya disampaikan oleh Daczko yang merumuskan bahwa target suatu transformasi adalah perubahan bentuk, penampilan, dan struktur dari suatu organisasi. Dalam konsep transformasi yang dikembangkan oleh Daczko lebih mengarah kepada dimensi manajemen transformasi yang bersifat menyeluruh atau holistik. Hal penting yang juga perlu digarisbawahi bahwa transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (*mindset*). Perubahan pola pikir masyarakat menjadi indikator efektivitas atau keberhasilan dari program transformasi tersebut. Sejalan dengan hal itu, program transformasi ini juga perlu dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini penting untuk tidak terjebak kembali kepada indoktrinasi dan mengkaji respons (input) masyarakat terhadap transformasi.

“Transformation is the creation and change of a whole new form, function or structure. To transform is to create something new that has never existed before and could not be predicted from the past. Transformation is a “change”

<sup>7</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Rosda Karya, 1994), hlm. 62

in mindset. It is based on learning a system of profound knowledge (see SoPK section) and taking actions based on leading with knowledge and courage.”<sup>8</sup>

Prinsip transformasi yang dibangun oleh Daczko digambarkan melalui bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sedangkan, Fairbank memberi pemahaman tentang dimensi implementasi transformasi dalam konteks modernisasi di kawasan Asia Timur.<sup>9</sup> Dia menjelaskan bahwa untuk menuju modernisasi di Asia Timur dibutuhkan transformasi teknologi yang disertai dengan kesiapan institusi sosial dan pola pikir masyarakat seperti halnya di “Barat.” Ketika membicarakan institusi sosial yang perlu disiapkan untuk kesuksesan transformasi teknologi adalah institusi keluarga dan sekolah. Keduanya perlu disiapkan agar terbangun suatu institusi yang kondusif untuk berlangsungnya transformasi teknologi. Setidaknya ini adalah pengalaman di negara-negara Asia Timur, khususnya Jepang. Sesuatu yang disiapkan oleh keluarga untuk menyongsong transformasi teknologi adalah membangun kebiasaan berpikir logis, pemahaman empirik, rasa ingin tahu kepada anak-anak sejak usia dini. Sedangkan kondisi kondusif yang perlu disiapkan oleh sekolah untuk menyongsong transformasi teknologi adalah keberpihakan kepada program tersebut, misalnya; mengedepankan bidang ilmu tertentu yang sejalan dengan transfer teknologi, menyiapkan laboratorium ilmu tertentu, mencetak tenaga pengajar bidang ilmu tertentu. Dengan

<sup>8</sup> Marcia Daczko dan Sheila Sheinberg, “Survival Is Optional: Only Leaders With New Knowledge Can Lead the Transformation.” *Theory of Transformation FINAL to SHORT*. Artikel edisi April 2005, hlm.1-10

<sup>9</sup> John Fairbank, et.al. *East Asia Modernization Transformation*, (Tokyo: Tuttle Company, Inc, 1965), hlm. V

demikian, transfer teknologi bisa terjadi jika ada rekayasa yang menyeluruh di berbagai pihak, di masyarakat maupun pemerintah. Jepang salah satu negara yang berhasil melakukan hal itu.

Lebih jauh menurut Fairbank, transformasi teknologi ini selaras dengan perubahan sosial yang juga merujuk kepada model transformasi sosial masyarakat Barat. Transformasi dalam kehidupan sosial ditandai oleh transformasi kehidupan keluarga, struktur sosial, nilai-nilai sosial, dan ideologi. Hal lain ditandai oleh munculnya gerakan-gerakan kemasyarakatan dengan berbagai tujuan dan kepentingan. Mungkin hal ini bisa dimaknai sebagai kemunculan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang meramaikan kehidupan masyarakat madani atau yang dalam terminologi ‘Barat’ disebut masyarakat sipil (*civil society*).

Penyampaian transformasi teknologi dan transformasi sosial di Asia Timur khususnya di Jepang ini hanya menjadi pembanding saja. Keduanya berbeda dalam sasaran dan rujukan dengan transformasi pengamalan Pancasila yang dibahas dalam artikel ini. Transformasi di Asia Timur tersebut sasarannya adalah perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat “Barat” (modernisasi) dengan segala perangkat dan institusinya, sedangkan transformasi yang dimaksud dalam artikel ini sasarannya adalah untuk memperkuat eksistensi Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Rujukan dari transformasi di Asia Timur adalah nilai-nilai “Barat,” sedangkan rujukan dari pelaksanaan transformasi pengamalan Pancasila adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Konstitusi NKRI, dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat mulai dari Sabang sampai Merauke.

Konsep lain yang juga menjadi dasar untuk memberi penjelasan adalah tiga dimensi ideologi Pancasila. Alfian memaknai ideologi sebagai sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bersama di suatu masyarakat.<sup>10</sup> Ideologi mencerminkan tatanan nilai yang paling mendasar dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi, ideologi merupakan

<sup>10</sup> Alfian, *Kebudayaan, dan Manusia Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 6.

referensi untuk memahami perubahan sosial dan pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat.

Lebih jauh, Alfian merumuskan adanya tiga dimensi dalam suatu ideologi.<sup>11</sup> Ketiga dimensi ideologi yaitu : (1) dimensi realitas (2) dimensi idealis, (3) dimensi fleksibel. Dalam pemahaman Alfian suatu ideologi harus memiliki ketiga dimensi tersebut dan Pancasila memiliki tiga dimensi ideologi tersebut. Ideologi memiliki cakupan yang komprehensif yaitu bisa memayungi semua kepentingan dan dinamika sosial. Ideologi juga bisa mengantarkan kepada suatu cita-cita bersama sebagai bangsa. Jadi asumsi yang bisa ditarik sesuai dengan pemahaman bahwa ideologi adalah dasar negara konsekuensinya ketika dasar itu goyah dan jauh dari masyarakatnya maka eksistensi negara dalam keadaan bahaya.

Guna mendalami lebih jauh tentang dimensi ideologi, berikut ini adalah tinjauan atas ketiganya. Pertama, dimensi realitas dipahami sebagai gambaran bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang tidak terpisahkan. Kesatuan antara nilai-nilai dan masyarakat ini dianalogikan seperti dua sisi dari mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena adanya saling ketergantungan satu sama lain. Selanjutnya, kedua dimensi ideal adalah gambaran tentang cita-cita yang dikandung di dalam suatu ideologi. Jika kita mengarah kepada Pancasila, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan sosial ini yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Dalam nilai keadilan sosial semua bangsa Indonesia tingkat kesejahteraannya sudah mendekati merata, tetapi juga bukan merata seperti yang dimaksud oleh paham Komunis. Jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin sudah menyempit. *Ketiga*, dimensi fleksibilitas adalah dimensi keterbukaan atas tuntutan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka memberi ruang kepada interpretasi baru sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ini adalah salah satu kekuatan dari

<sup>11</sup> Wawancara dengan Syamsuddin Haris, Peneliti Senior P2 Politik LIPI di Jakarta pada 11 November 2016.

Pancasila karena dia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dari waktu ke waktu.

Selain dari itu, konsep identitas keindonesiaan juga menjadi konsep penting untuk menjadi alat yang menjelaskan artikel ini. Santoso memberi gambaran mengenai identitas Keindonesiaan berada di tengah-tengah kutub yaitu antara lokalitas dan globalitas. Dia berpandangan bahwa globalisasi akan membawa pengaruh kepada identitas kebangsaan karena arus globalisasi mengandung muatan sistem nilai, gaya hidup, dan pandangan hidup dari berbagai kawasan di dunia yang bebas bisa merambah masuk ke suatu negara dan berinteraksi dengan masyarakatnya, tentu saja pengaruh tadi ada yang baik dan ada pula buruk akibatnya terhadap identitas keindonesiaan.<sup>12</sup>

Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khasnya, dan berdasarkan ciri-ciri khas tersebut suatu bangsa dapat dibedakan dengan bangsa lain.<sup>13</sup> Oleh karena itu, identitas keindonesiaan adalah ciri khas nilai-nilai budaya yang tumbuh di bumi Indonesia dan menjadi ciri yang membedakan dengan bangsa lain. Identitas keindonesiaan dalam hal ini dipahami dari konsep sosio-kultural yang terdiri dari tiga aspek yaitu; *artifact (things people make)*, *sosiofact (how people come together and for what purpose)*, *mentifact (what people think and believe)*.<sup>14</sup>

Selanjutnya, identitas keindonesiaan dalam konteks sosial kultural di atas dan manifestasi nilai budaya Indonesia dibedakan ke dalam beberapa aspek. Ketiga aspek itu adalah (1)

<sup>12</sup> Nilai yang berpengaruh buruk adalah nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar, pandangan hidup masyarakat Indonesia dilihat dari konteks agama dan kearifan lokal, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat, sedangkan nilai-nilai berpengaruh baik adalah sebaliknya yaitu nilai-nilai yang selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia dan bahkan memperkuat nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia.

<sup>13</sup> Ruhayandi, "Meneguhkan Identitas Budaya Nasional," 20 Mei 2012, [https://www.academia.edu/8915510/Meneguhkan\\_Identitas\\_Budaya\\_Nasional?auto=download](https://www.academia.edu/8915510/Meneguhkan_Identitas_Budaya_Nasional?auto=download), diakses pada 12 Juni 2017.

<sup>14</sup> Alvino, E. Fantini, "Artifact, Sociofact, and Mentifact: a Sociocultural Framework," *New Ways in Teaching Culture*, (Alexandria: Teacher of English to Speak other Languages, Inc, 1995), hlm. 1

Identitas keindonesiaan dalam aspek *artifact*. Keindonesiaan yang khas dapat diidentifikasi kepada sejumlah karya seni; bela diri pencak silat, wayang kulit, gamelan, angklung, kulintang, keris, candi Borobudur, perahu pinisi, (2) Identitas keindonesiaan dalam aspek *sosiofact* dapat diidentifikasi ke dalam perilaku sosial khas rakyat Indonesia misalnya; nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, toleransi, harmoni, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, (3) Identitas keindonesiaan dalam aspek *mentifact* yang Indonesia khas dapat diidentifikasi kepada pandangan dan harapan akan masyarakat adil makmur (*loh jinawi tata tentrem kerto raharjo*), aman sentosa, dan kepercayaan datangnya ratu adil.

Sementara itu, identitas budaya lokal yang berisi kearifan lokal adalah warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Identitas lokal ini menjadi rujukan berkembangnya identitas keindonesiaan. Tumbuh kembangnya identitas keindonesiaan sebenarnya mencerminkan tumbuh suburnya identitas lokal. Meminjam bahasa yang dipakai Santoso bahwa perkembangan identitas keindonesiaan berada dalam bayang-bayang nilai-nilai lokal atau tradisional. Hal ini adalah sesuatu yang ideal karena artinya identitas keindonesiaan tumbuh berkembang dengan berpijak pada akar nilai-nilainya sendiri.

Hanya saja masalah terjangan arus globalisasi demikian kuat sehingga rasanya pesimis masyarakat Indonesia steril dari pengaruh global. Sesuatu yang dibutuhkan adalah strategi menghadapinya. Setidaknya ada dua yaitu: (1) melaksanakan kebijakan *adapteren* (strategi kebudayaan) yaitu menerima budaya global dengan menyesuaikan kepada budaya lokal atau nasional. Budaya global yang diambil harus terseleksi yaitu yang diambil adalah isinya buka kulitnya, cara berpikir dan cara bertindak yang benar dan baik ketimbang mengambil produk-produk budayanya.<sup>15</sup> (2) Menjadikan ideologi Pancasila dan kearifan lokal sebagai alat untuk menyeleksi masuknya budaya global

tersebut. Keberadaan Pancasila sebagai media penyeleksi tersebut tentu saja hanya sebagai rujukan dan parameter interaksi antara budaya lokal atau nasional dengan budaya global. Konsekuensinya, budaya global yang masuk ke Indonesia bisa diterima dan memperkaya identitas keindonesiaan, atau sebaliknya ditolak karena tidak sejalan dengan keberadaan identitas keindonesiaan itu sendiri, Pancasila, dan kearifan lokal.

### **Dimensi Fleksibilitas Pancasila**

Seperti disebut pada bagian sebelumnya bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka sehingga membuka ruang kepada interpretasi baru sesuai dengan dinamika politik dan sosial. Di sinilah letak dari kekuatan dari Pancasila karena dia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu memanfaatkan kekuatan Pancasila tersebut agar tetap mampu menjadi dasar berpijak masyarakat, tetap relevan dengan perkembangan zaman, dan tetap mampu menjawab tantangan zaman yang berbeda dari satu era kepada era lain.

Dimensi fleksibilitas adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadi perubahan dan pembaruan agar suatu objek tetap bisa bertahan dari waktu ke waktu. Jika merujuk pada konsep transformasi, perubahan disini terjadi pada dimensi fungsi, bentuk, (penampilan), dan struktur dari suatu objek. Dengan demikian, ketiganya merupakan unsur utama dari suatu perubahan atau interpretasi baru.

Dalam konteks ini, batas fleksibilitas berada pada interpretasi terhadap keberadaannya dan sosialisasinya. Struktur dan isi dari ideologi Pancasila tidak dirubah karena sudah baku, tetapi tapi tafsir atau interpretasi baru bisa dilakukan terhadap fungsi Pancasila, model sosialisasi Pancasila, dan struktur materi sosialisasi Pancasila. Hal ini dilakukan sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi dari waktu ke waktu dan perkembangan zaman yang tantangannya berbeda setiap era.

Para pendiri negara memberi dimensi fleksibilitas kepada Pancasila untuk mengakomodir perubahan sosial di kemudian hari. Perubahan sosial akan melahirkan

<sup>15</sup> Listiyono Santoso, "Penguatan Identitas ke-Indonesia-an: Mendayung di Antara Lokalisme dan Globalisme," [http://www.academia.edu/8509004/Penguatan\\_Identitas\\_ke-Indonesia-an\\_Mendayung\\_di\\_Antara\\_Lokalisme\\_dan\\_Globalisme](http://www.academia.edu/8509004/Penguatan_Identitas_ke-Indonesia-an_Mendayung_di_Antara_Lokalisme_dan_Globalisme), diakses pada 17 Mei 2017

perubahan-perubahan tata nilai di masyarakat. Nilai-nilai baru ini perlu diakomodir oleh ideologi Pancasila dengan memanfaatkan referensi lain yang mendampinginya seperti prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Mukadimah UUD 45, batang tubuh UUD 45, dan kearifan lokal. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi bersifat abstrak dan universal yang mampu memayungi perubahan sosial di seluruh Indonesia, bahkan mampu memayungi dinamika internasional.

Pada masa Orde Baru Pelaksanaan Pancasila berdasarkan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Hal ini diatur berdasarkan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Ketika datang era Orde Reformasi TAP MPR tersebut dicabut melalui TAP MPR no.XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Tap MPR No. II. Dengan alasan materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara sehingga perlu dicabut.

Sejak berlaku TAP MPR/XVIII/1998 tersebut maka P4 sudah tidak berlaku lagi. Hal ini bisa dipahami karena P4 merupakan warisan Orde Baru yang menyisakan kenangan pahit kepada masyarakat Indonesia. Terdapat kendala psikologi yang cukup berat untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat di era Reformasi. Oleh karena itu, strategi sosialisasi dengan pendekatan baru diperlukan.

TAP MPR NO.XVIII/1998 memberi catatan tentang keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, seperti dikutip di bawah ini:

#### Pasal 1

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

#### Pasal 2

Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MPR melalui produk hukumnya seperti tersebut di atas sudah menyatakan melalui pasal 2 bahwa P4 dicabut, tetapi di sisi lain yaitu melalui pasal 1 juga menyatakan bahwa Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan harapan tersebut, suatu institusi perlu dibentuk yang bertanggungjawab atas hal itu. Pesan moral yang disampaikan oleh TAP MPR/XVIII/1998 kepada pemerintahan-pemerintahan di era Reformasi sudah jelas dan gamblang, namun demikian sangat disayangkan pesan moral dari TAP MPR/XVIII/1998 tersebut belum terlihat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pesan moral yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah adalah setelah P4 dicabut tentu perlu penggantinya. Hal ini agar tidak terjadi kekosongan dalam upaya menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Setelah mengkritisi rezim Orde Baru, bangsa Indonesia (pemerintah di era reformasi) juga harus konsisten. Jika ada institusi yang dicabut maka segera diganti dengan yang baru yang lebih sesuai dengan dinamika masyarakat di era reformasi. Hal ini perlu dilakukan agar Pancasila dapat dilaksanakan sebagai dasar negara secara konsisten oleh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan harapan dari Pasal 1 TAP MPR/XVIII/1998. Hal ini juga perlu untuk menghindari penilaian dari anak cucu di kemudian hari bahwa generasi era reformasi adalah generasi yang hanya pandai mencabut, tetapi kurang pandai menggantinya dengan yang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Ahmad Basarah dalam suatu promosi disertasinya memberi rekomendasi terhadap keberadaan Pancasila. Rekomendasi ini menyatakan bahwa pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan eksekutif perlu untuk membuat panduan atau pedoman sebagai dokumen resmi dalam menafsirkan dan memahami sila-sila Pancasila yang bersumber dari dokumen otentik Pidato Pancasila 1 Juni 1945.<sup>16</sup> Panduan atau pedoman resmi tentang Pancasila tersebut juga dimaksudkan agar segenap komponen bangsa tidak memaknai Pancasila sesuai dengan selera

<sup>16</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Pancasila hanya dapat diubah dengan cara makar," 2016, <http://www.mpr.go.id/posts/pancasila-hanya-dapat-diubah-dengan-cara-makar>," diakses pada 24 Mei 2017

dan kepentingannya masing-masing yang bersifat perseorangan, kelompok, maupun golongan.

Pada akhir tahun 2016, muncul wacana perlunya Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP). Hanya saja baru 7 Juni 2017 harapan akan adanya institusi yang bertanggungjawab atas ideologi negara ini bisa terwujud. Keberadaannya ditandai dengan langkah Presiden Joko Widodo melantik Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara. Susunan Dewan Pengarah dan Kepala UKP-PIP yang baru saja dilantik Presiden, meliputi : 1. Megawati Soekarnoputri, 2. Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno, 3. Muhammad Mahfud MD, 4. Ahmad Syafi'i Ma'arif, 5. KH Ma'ruf Amin, 6. KH Said Aqil Siraj, 7. Andreas Anangguru Yawenoe, 8. Mayjen TNI (purn) Wisnu Bawa Tenaya, 9. Sudhamek AWS. UKP-PIP ini dalam kegiatan operasionalnya dipimpin oleh seorang Kepala UKP-PIP yaitu Yudi Latif.<sup>17</sup>

### Aspek *Sociofact* dan Identitas Keindonesiaan

Identitas Keindonesiaan dalam dimensi *sociofact*<sup>18</sup> dapat diidentifikasi ke dalam kehidupan sosial sehari-hari yang menjadi ciri khas Indonesia sejak zaman nenek moyangnya, misalnya; gotong royong, kekeluargaan, toleransi, dan harmoni. Sebagian kalangan menilai bahwa aspek *sociofact* ini berubah sejalan dengan tekanan arus globalisasi dan terlupakannya Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat. Artinya masyarakat Indonesia mengalami pergeseran nilai, dan perilaku sosial yaitu, menuju kehidupan individualis, intoleran, dan disharmoni khususnya di kota-kota besar. Kondisi ini dapat mengancam kerukunan yang selama ini terjalin di dalam kehidupan masyarakat. Apalagi, di beberapa wilayah Indonesia terjadi konflik sosial dan ancaman dis-integrasi. Namun demikian,

<sup>17</sup> Ahmad Romadoni, "Yudi Latif Resmi Jadi Kepala UKP Pemantapan Ideologi Pancasila," 7 Juni 2017, <http://news.liputan6.com/read/2981038/yudi-latif-resmi-jadi-kepala-ukp-pemantapan-ideologi-pancasila>, diakses pada 11 Juli 2017

<sup>18</sup> Aspek *sociofact* adalah identitas keindonesiaan yang menggambarkan pola-pola interaksi sosial dalam suatu komunitas baik dalam mencapai tujuan individu maupun tujuan bersama (*how people come together and for what purpose*)

sebagian kalangan berpandangan fenomena ini merupakan dinamika sosial yang secara alami terjadi dimana-mana sebagai konsekuensi perubahan dari masyarakat di bawah rezim otoriter kepada masyarakat demokrasi. Hal ini merupakan gejala sosial biasa akibat adanya transisi sosial yang belum kunjung selesai.

Terlepas dari pro-dan kontra yang sedang melanda masyarakat Indonesia, potret dinamika sosial masyarakat yang sedang terjadi perlu untuk diinformasikan dan didiskusikan. *Indonesian Police Watch* (IPW) melaporkan hasil survey pada tahun 2013 dan menggambarkan bahwa konflik sosial di Indonesia meningkat dan 6 (enam) daerah diidentifikasi adalah rawan konflik, yaitu: 1). Papua, 2) Jawa Barat, 3).DKI, Jaya, 4) Sumatra Utara, 5). Sulawesi Tengah, 6). Jawa Tengah.<sup>19</sup> Daerah-daerah tersebut perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga harmoni sosial.

Lebih jauh digambarkan bahwa konflik sosial ini dipicu oleh berbagai dimensi sosial-budaya di masyarakat. Khususnya konflik ini meliputi dimensi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. *Cirus Surveyors* menggambarkan berdasarkan surveynya bahwa konflik di Indonesia disebabkan sejumlah masalah seperti di bawah ini.

**Tabel 1.** Konflik Horizontal tahun 2014

No.	Kategori Pemicu	Prosentase
1	Kemiskinan	44,3 %
2	Pengangguran	37,2 %
3	Agama	6,7 %
4	Etnis	4,1 %

Sumber: Anshori "Kontruksi Identitas Budaya Ke-Indonesiaan dalam Wacana Buku Teks Sekolah Dasar, makalah [http://ejournal.upi.edu/index.php/BS\\_JPBSP/article/viewFile/4479/pdf](http://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/viewFile/4479/pdf)

Dari tabel di atas dapat digambarkan tentang konflik sosial selama tahun 2014. Kategori pemicu konflik terdapat empat variabel yaitu: kemiskinan, pengangguran, agama dan etnis. Dari aspek *sociofact* konflik ekonomi ini dimaknai sebagai menipisnya semangat ekonomi

<sup>19</sup> Dadang S. Anshori, "Kontruksi Identitas Budaya Ke-Indonesiaan dalam Wacana Buku Teks Sekolah Dasar, makalah [http://ejournal.upi.edu/index.php/BS\\_JPBSP/article/viewFile/4479/pdf](http://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/viewFile/4479/pdf)," diakses pada 16 April 2017

gotong royong atau saling membantu antar kelas sosial di masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.

Konflik sosial di Indonesia terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Walaupun tumbuh secara perlahan, ekonomi Indonesia kian membaik yang ditandai oleh tingkat pertumbuhan ekonomi 5,18 % pada kuartal ke-II tahun 2016.<sup>20</sup> Hal ini bergerak linier dengan tumbuhnya kelas sosial menengah baru di Indonesia. Seperti diketahui bahwa kelas sosial menengah baru ini umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: individualis atau tingkat bersosialisasi rendah, tingkat berpendidikan tinggi, tingkat pendapatan di atas rata-rata masyarakat, tingkat kesibukan tinggi, dan tingkat konsumsi juga tinggi. Beberapa ciri di atas berkontribusi terhadap munculnya kecemburuan sosial yang dapat melahirkan konflik sosial di Indonesia.

Sedangkan konflik etnis dan agama dipahami sebagai konflik kultural yang disebabkan oleh arus globalisasi. Globalisasi sebagai fenomena meningkatnya mobilitas manusia, barang, dan jasa. Karena globalisasi merobohkan sekat-sekat nasional dari gerak informasi, lingkungan manusia tidak lagi terbatas pada lingkungan nasionalnya, tetapi sudah berubah menjadi lingkungan global. Sementara itu, pandangan dan perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, termasuk lingkungan informasinya. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak mengherankan interaksi individu-individu dengan informasi global melalui jaringan internet berpengaruh tata-nilai dan perilaku sosialnya, khususnya pandangannya terhadap nilai-nilai toleransi, kekeluargaan, gotong-royong, dan harmoni yang selama ini bagian penting dari masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, konflik agama dan etnis dipahami sebagai pergeseran aspek *sociofact* kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini berkenaan dengan era reformasi yang membuka ruang kepada akses keterbukaan informasi dan interaksi dengan globalisasi. Diduga interaksi

tersebut berpengaruh terhadap cara pandang dan nilai-nilai sosial sebagian masyarakat Indonesia seperti; toleransi, harmoni, gotong royong, kebersamaan dimana hal ini sejatinya adalah identitas keindonesiaan. Akibatnya, sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa identitas keindonesiaan mulai terancam.

Hal menarik lainnya adalah temuan adanya korelasi antara institusi dan kondisi di era reformasi dengan konflik sosial. Institusi-institusi di era reformasi dinilai ikut bertanggungjawab terhadap terjadinya konflik sosial. Eforia reformasi merupakan suatu kegoncangan mental masyarakat Indonesia yaitu dari masyarakat tertindas menjadi masyarakat yang sangat bebas. Di era reformasi ini masyarakat mengalami perubahan pola pikir dan perilaku. Demokratisasi yang mendepankan kebebasan berekspresi menjadi nilai penting namun juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

**Tabel 2.** Institusi & Kondisi di era Reformasi Berpotensi menimbulkan konflik

No.	Kebijakan & Kinerja	Keterangan
1.	Lembaga Politik	Lebih mengedepankan kepentingan kelompok dari pada kepentingan nasional
2.	Kinerja Lembaga Pemerintah	Lemah penegakan hukum, kurang koordinasi, kurang adil, menimbulkan ketidakpuasan di sebagian masyarakat
3.	Kebijakan Otonomi Daerah	Otonomi daerah menimbulkan konflik vertikal dan horizontal di sejumlah daerah
4.	Kebebasan Informasi	Kebebasan informasi memungkinkan masuknya informasi yang menyesatkan dan memecah-belah masyarakat
5.	Kebebasan berpendapat	Kebebasan berpendapat mendorong orang berbicara melampaui batas kebenaran sehingga menimbulkan fitnah, dan agitasi, propaganda khususnya di sosial media

Sumber: Anshori "Kontruksi Identitas Budaya Ke-Indonesiaan dalam Wacana Buku Teks Sekolah Dasar", makalah [http://ejournal.upi.edu/index.php/BS\\_JPBSP/article/viewFile/4479/pdf](http://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/viewFile/4479/pdf)

### **Transformasi Fungsi Pancasila: dari Alat Kepentingan Politik menjadi Adaptor antara Identitas Keindonesiaan dan Globalisme**

Fungsi Pancasila di era Reformasi menjadi filter yang menyelaraskan identitas keindonesiaan dan globalisme. Fungsi Pancasila menjadi strategis dalam mengawal identitas keindonesiaan. Di lain pihak menjadi referensi dari masuknya nilai-nilai global. Dengan demikian, ekses globalisasi

<sup>20</sup> BBC Indonesia, "Ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2016 terus membaik," 2016, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160805\\_indonesia\\_ekonomi\\_q2](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160805_indonesia_ekonomi_q2), diakses pada 27 Februari 2017

bisa dieliminir, sebaliknya manfaat positif dari globalisme bisa dipetik. Jadi, sesuatu yang bisa memperkaya identitas keindonesiaan bisa diambil dari globalisme.

Seperti disampaikan pada bagian terdahulu, bahwa fungsi Pancasila di era Orde Baru menjadi alat kepentingan politik penguasa. Pancasila menjadi alat legitimasi Pemerintahan Suharto. Pemerintahan Suharto menyebut dirinya Demokrasi Pancasila. Padahal, Pemerintahan pada masa itu tidak demokratis. Konsekuensinya, masyarakat berpandangan bahwa tatanan politik yang dibangun oleh Suharto sudah sesuai dengan Pancasila. Tindakan semacam ini sebenarnya menyesatkan dan menjauhkan masyarakat dari Pancasila jika tidak ada koreksi bahwa tindakan itu tidak benar dan Orde baru itu tidak identik dengan eksistensi Pancasila yang benar.

Sedangkan fungsi Pancasila di era Reformasi diharapkan melaksanakan fungsi adaptasi dan seleksi. (1) Fungsi adaptasi dalam hal ini Pancasila melaksanakan kebijakan *adapteren* (strategi kebudayaan) yaitu menerima budaya global dengan menyesuaikan kepada budaya lokal atau nasional. (2). Menjadikan ideologi Pancasila dan kearifan lokal sebagai alat untuk menyeleksi masuknya budaya global tersebut. Keberadaan Pancasila sebagai media filter (penyeleksi) tersebut tentu saja hanya sebagai rujukan dan parameter interaksi antara budaya lokal atau nasional dengan budaya global. Konsekuensinya, budaya global yang masuk ke Indonesia bisa diterima dan memperkaya identitas keindonesiaan, atau sebaliknya ditolak karena tidak sejalan dengan keberadaan identitas keindonesiaan itu sendiri, Pancasila, dan kearifan lokal.

Fungsi Pancasila yang demikian terasa berat, karena berpotensi terjadi kendala konflik kepentingan khususnya dari kalangan elit dan masyarakat sendiri. Perilaku elit yang masih berorientasi kepada kepentingan diri dan kelompok ketimbang kepentingan nasional menjadi kendala untuk menjadikan Pancasila sebagai adaptor dan filter dari globalisme. Pemerintah perlu mengundang para pimpinan elit untuk bersama-sama mendiskusikan tentang fungsi Pancasila seperti yang diharapkan tersebut. Selanjutnya, struktur sosial masyarakat Indonesia

yang heterogen secara suku, agama, ras, dan aliran juga menjadi kendala. Heterogenitas ini akan menimbulkan beragam pandangan terhadap keberadaan upaya menjadikan Pancasila sebagai adaptor dan filter nilai-nilai global tersebut. Keberagaman pandangan tersebut belum tentu menguntungkan tujuan tersebut, tetapi segala sesuatunya bisa diatasi dengan pendekatan persuasi. Apalagi masyarakat sudah lama tidak mendapat sosialisasi tentang Pancasila sehingga kurang memahami arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia.

Namun demikian, timbulnya berbagai macam problematik kebangsaan belakangan ini membuat masyarakat Indonesia kembali mencari identitas dirinya dan pijakan dalam menyelesaikan masalah kebangsaan tersebut. Dalam kondisi demikian, masyarakat akan membutuhkan keberadaan Pancasila sebagai referensi dasar untuk merespons berbagai persoalan tersebut. Keberadaannya merupakan identitas keindonesiaan yang diwariskan oleh pendiri bangsa. Selama ini keberadaannya terlupakan dan dijauhi oleh masyarakat karena disalahgunakan oleh Orde Baru. Oleh karena itu, dimasa mendatang keberadaan Pancasila perlu dikontrol secara ketat oleh masyarakat agar tidak mengulang kesalahan Orde Baru.

### **Transformasi Model Sosialisasi Pancasila: Bernuansa Seni-Budaya, Terbuka, dan Rasional.**

Kegagalan Orde Baru menjadi pelajaran berharga dalam melakukan sosialisasi Pancasila dimana sosialisasi di kemudian hari hendaknya bersifat terbuka dan rasional. Sosialisasi di era reformasi menyesuaikan dengan karakter sosial masyarakat yang sangat menyadari arti penting nilai kebebasan dan demokrasi sehingga sosialisasi model Orde Baru yang indoktrinasi sudah tidak relevan.

Sosialisasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di masa Orde Baru kepada instansi pemerintah, non- pemerintah, serta masyarakat sifatnya lebih instruktif. Adapun badan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan P4 yang disebut Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dinilai kurang

kreatif dalam mengembangkan strategi untuk menjadikan sosialisasi Pancasila sebagai sesuatu yang disenangi dan diperlukan oleh masyarakat.

Belajar dari kegagalan Sosialisasi P4 di Era Orde Baru, sosialisasi Pancasila ke depan harus bersifat terbuka. Sosialisasi perlu mendepankan nilai keterbukaan karena ini merupakan semangat dari reformasi 1998. Perlu pemikiran agar sosialisasi Pancasila menjadi forum yang menyenangkan bagi masyarakat untuk melakukan dialog pemikiran dan bertukar gagasan secara santun dan kekeluargaan. Iklim kebebasan berpikir perlu dibangun karena merupakan langkah awal untuk mencapai kebebasan menyatakan pikiran.<sup>21</sup> Jika mengarah kepada bentuk konflik pemikiran atau perdebatan sekalipun dalam kearifan lokal ada polanya sehingga yang sudah teruji dalam perjalanan sejarah di masa lalu. Misalnya, bukankah nenek moyang kita juga sudah biasa terlibat perdebatan dalam demokrasi desa yang berada di dalam koridor adat. Hal ini perlu menjadi referensi dalam membangun pola dialog pemikiran atau konflik pemikiran. Hal penting yang harus digarisbawahi bahwa di masa lalu nenek moyang masyarakat Indonesia juga terlibat konflik pemikiran, tetapi dilakukan dengan penuh sopan-santun. Misalnya hal itu dilakukan dengan melalui cara berbalas pantun, menyampaikan pikiran dengan sampiran, peribahasa dan hal-hal lain. Hal ini tidak dimaksudkan agar diadopsi secara mutlak, tetapi setidaknya bisa menjadi inspirasi. Hal-hal semacam ini perlu digali karena mencerminkan nilai-nilai “Kepribadian Timur.”

Strategi lain, para peserta sosialisasi Pancasila menunjukkan identitas keindonesiaannya. Misalnya para peserta sosialisasi Pancasila diminta menggunakan busana dan atribut daerahnya masing-masing. Hal semacam ini akan membangun kecintaannya terhadap daerahnya dan Keindonesiaan pada umumnya. Pada acara sosialisasi juga bisa ditampilkan berbagai kesenian dan kebudayaan daerah di Indonesia untuk kegembiraan dan pengetahuan tentang berbagai seni-budaya yang ada di Indonesia. Hal semacam ini menimbulkan rasa senang, gembira, kepada peserta sosialisasi Pancasila dan

memberi pengetahuan peserta akan beragamnya seni dan kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta dari Jawa akan mengenal Tari Serampang dua belas dari Sumatra, di lain pihak peserta sosialisasi Pancasila dari Kalimantan akan mengenal tari Topeng dari Jakarta.

Sosialisasi juga perlu menanamkan nilai gotong royong yang sudah mulai dilupakan oleh masyarakat khususnya di daerah elit perkotaan. Filosofi kekeluargaan, kekerabatan, tolong-menolong, dan gotong-royong perlu digali dan disampaikan kepada peserta sosialisasi. Nilai gotong royong identik dengan kebersamaan dimana hal ini sudah mulai tergusur oleh nilai-nilai individualis khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Fenomena perubahan perilaku sosial ini menarik untuk dikaji oleh peserta sosialisasi Pancasila. Namun demikian, dinamika sosial di pada kelas sosial bawah mengindikasikan sesuatu yang berbeda karena nilai-nilai kekerabatan di kalangan kelas sosial ini dinilai masih kuat. Indikatornya masih banyak ditemukan kelompok arisan lingkungan, arisan keluarga, pengajian, dan masih dijumpai kerja bakti khususnya di kawasan perkotaan padat penduduk.

Hal semacam ini tentu saja tidak terjadi pada lapisan kelas sosial menengah dan atas karena berbagai keterbatasan. Misalnya mereka memiliki keterbatasan waktu karena kesibukan pekerjaan. Kelas sosial menengah dan kelas sosial atas perkotaan umumnya di tinggal apartemen dan kluster (komplek perumahan kecil). Pola hidup bersama di kawasan demikian ditandai dengan sangat minimnya interaksi sosial. Selanjutnya, pertimbangan keamanan juga menyebabkan individu-individu membatasi diri dalam bersosialisasi di lingkungan tempat tinggal. Perampokan seringkali terjadi di lingkungan elit. Sistem keamanan lingkungan belum dibangun terpadu dan bersinergi dengan kepolisian setempat. Bahkan terkadang ada perumahan elit yang jumlah pos dan personal petugas keamanannya minim.

Para peserta juga diajak berpikir rasional bukan dogmatis seperti lazimnya suatu indoktrinasi. Hal ini perlu dilakukan karena sesuai dengan pepatah nenek moyang juga bahwa ”pikir itu pelita hati.” Ternyata menggunakan akal atau berpikir logis sudah menjadi bagian

<sup>21</sup> Mochtar Lubis. *Budaya, Masyarakat dan Manusia Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 15

dari kehidupan nenek moyang kita. Para peserta diajak untuk meneruskan kembali kebiasaan berpikir rasional yang diwariskan oleh nenek moyang. Hal ini perlu untuk menyikapi berbagai persoalan kehidupan sehingga mereka juga terlatih untuk menggunakan daya pikir dan kritis terhadap persoalan kehidupan. Dengan demikian, materi sosialisasi Pancasila juga harus logis dan bisa dijelaskan secara rasional.

### **Transformasi Materi Sosialisasi: Terintegrasi dan Visioner**

Struktur materi sosialisasi Pancasila seharusnya bersifat terintegrasi dan visioner agar Pancasila bisa menjadi jawaban terhadap problematik bangsa saat ini maupun di masa depan. Oleh karena itu materinya mencerminkan kesinambungan relitas masa lalu, masa kini, dan visi masa depan dari bangsa Indonesia.

Struktur materi harus mencerminkan dimensi historis, kondisi kekinian dari sosial-budaya, ekonomi, politik, dan masa depan yang diharapkan. Struktur materi harus memuat dimensi historis bangsa Indonesia. Hal ini perlu agar peserta sosialisasi memahami kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik di masa merebut kemerdekaan. Kondisi itu melahirkan nilai-nilai kebangkitan bangsa 1908, nilai-nilai sumpah pemuda 1928, dan nilai-nilai perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia melawan kolonialisme dan melahirkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jadi ini perlu dipelajari oleh peserta sosialisasi karena terkandung nilai-nilai Ketuhanan, gotong-royong, kebersamaan, dan persatuan dalam menjawab tantangan besarnya.

Selanjutnya struktur materi juga perlu memuat kondisi kekinian dari dimensi sosial-budaya, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuannya. Dalam hal ini, materi perlu menyajikan *das sein dan das solen* apa yang nyatanya terjadi dan apa yang seharusnya terjadi dari bangsa Indonesia dewasa ini dalam dimensi tersebut. Oleh karena itu, materi ini dalam diskusi terbuka bukan mustahil akan melahirkan kritik dari peserta sosialisasi terhadap berbagai pihak bahkan kepada Pemerintah, tetapi hal ini disikapi secara wajar dan terbuka sejauh dilakukan dengan sopan

yaitu seperti tersebut di atas bisa menggunakan bahasa pantun atau sampiran. Justru kritik ini dipandang sebagai masukan berharga bagi berbagai kalangan termasuk Pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya.

Struktur materi juga harus memuat tentang strategi bangsa Indonesia menghadapi masa depan dunia. Bangsa Indonesia perlu strategi tertentu untuk menghadapi masa depan dunia yang bercirikan *global village*. Masyarakat perlu dicerahkan atas isu-isu global yang punya dampak kepada Indonesia di kemudian hari. Misalnya isu kelangkaan energi global, terorisme global, jaringan kriminal global, dan konspirasi kapitalisme global agar masyarakat Indonesia memahami hal itu sehingga tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam mencapai tujuan dan kepentingannya. Hal ini penting dilakukan karena struktur internasional semakin tidak terbatas dalam dimensi negara, khususnya dalam hal lalu lintas informasi dan tata-nilai global. Jadi, bangsa Indonesia perlu dikondisikan agar mampu mengantisipasi dampak dari perkembangan globalisme di masa depan.

Struktur materi sosialisasi Pancasila sebaiknya disusun berdasarkan prinsip ilmu pengetahuan. Hal ini perlu dilakukan karena ilmu pengetahuan dan filsafat diharapkan dapat membantu menyelesaikan program sosialisasi Pancasila. Ilmu pengetahuan khususnya psikologi, antropologi, sosiologi, dan filsafat diharapkan mampu memetakan dan menjelaskan problematik dan memberi solusi kepada model baru sosialisasi Pancasila di dalam tingkat pelaksanaan kelak di kemudian hari.

Selanjutnya, struktur materi perlu dibedakan peruntukan bagi berbagai golongan masyarakat. Hal ini bukan bermaksud membuat diskriminasi antara golongan tersebut, tetapi untuk menyelesaikan program ini. Paket materi dibedakan ke dalam golongan muda, dewasa, dan tua karena setiap paket akan memuat materi dan pendekatan yang berbeda. Anak-anak muda perlu materi yang disampaikan terkait dengan kebutuhan dan dunia anak muda. Pendekatannya juga dengan menggunakan gaya populer anak muda. Bahkan bisa saja yang menyampaikan materi adalah *public figure* seperti: artis, vokalis,

atau simbol anak muda lainnya yang direkrut dan dibekali agar bisa menjadi penyampai materi di depan anak-anak muda. Prinsipnya sosialisasi dilaksanakan dengan suasana menyenangkan, tetapi tercapai tujuannya.

## Penutup

Setiap ideologi merefleksikan sistem politik, sistem sosial, dan sistem ekonomi dari suatu organisasi masyarakat tertinggi atau negara. Dalam arti luas ideologi dimaknai sebagai bentuk faham pemikiran dan pandangan hidup seperti Individualisme, Rasionalisme, Liberalisme, Positivisme, Psikologisme, Determinisme ekonomi dan lain-lain. Sejarah pertumbuhan ideologi membedakan menjadi ideologi keagamaan dan ideologi non-keagamaan.<sup>22</sup> Dalam konteks ini, ideologi dimaknai sebagai dasar dari sebuah negara dan pandangan hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam perspektif etika politik segala struktur kenegaraan dan proses penyelenggaraan kehidupan bernegara berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi. Hal ini termasuk di dalamnya model budaya politik yang dibangun, bentuk partisipasi politik yang dikembangkan baik yang konvensional (diskusi politik) maupun non-konvensional (demonstrasi),<sup>23</sup> gaya komunikasi politik yang dilakukan dan berbagai dimensi kehidupan bernegara lainnya.

Jadi, ideologi juga dipahami sebagai pandangan hidup suatu masyarakat. Dalam perspektif sosial, segala kehidupan sosial merujuk pada nilai-nilai yang termuat dalam ideologi tersebut. Hal ini termasuk di dalamnya bentuk struktur sosial yang berkembang, pola interaksi sosial sehari-hari, dan nilai-nilai sosial yang hidup masyarakat. Jadi, ideologi menjiwai struktur dan sistem sosial di suatu masyarakat.

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin lama semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila

sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah. Di lain pihak, globalisasi semakin lama semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlahan-lahan mulai kehilangan rujukan dalam perilaku politik dan perilaku sosialnya karena tercabut dari akar nilai-nilai dasar yang melandasi kehidupannya selama ini. Dalam situasi jauh dari referensi dasar kehidupan politik dan sosialnya ini, masyarakat Indonesia perlahan-lahan bergerak menuju kepada kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya.

Oleh karena itu, wacana transformasi Pancasila ini diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan kebangsaan tersebut. Wacana transformasi ini diharapkan punya dampak strategis kepada Pemerintah Indonesia dan masyarakat. Hal itu meliputi fakta dan konsekuensi: (1) Pemerintah Indonesia selama era Reformasi kurang menyadari bawah Pancasila adalah dasar negara dimana keberadaannya menentukan keberlanjutan NKRI ke depan. (2) Transformasi pengamalan Pancasila diharapkan menyadarkan masyarakat bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup yang diwariskan oleh pendiri bangsa sehingga perlu menjadi referensi dalam menyikapi berbagai masalah kebangsaan.

Transformasi Pancasila seharusnya dilakukan dengan manajemen yang benar. Manajemen transformasi itu meliputi: (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (*mindset*). (3) Transformasi ini juga perlu dilandasi oleh ilmu pengetahuan.

Selanjutnya, transformasi Pancasila dilaksanakan dengan mempertimbangkan tiga aspek. Hal itu meliputi berikut: (1) Aspek fungsi yaitu menjadikan Pancasila sebagai fungsi adaptor dan filter untuk masyarakat Indonesia dalam merespons globalisasi. (2) Aspek sosialisasi model baru yaitu sosialisasi Pancasila dilaksanakan dengan memanfaatkan bingkai kebudayaan daerah dan dilaksanakan dengan suasana menyenangkan (3) Aspek struktur materi yang terintegrasi dan visioner. Hal yang juga penting sosialisasi Pancasila

<sup>22</sup> Pranarka, *Epistemologi Dasar: Suatu Pengantar* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1987), hlm. 154-155.

<sup>23</sup> Gabriel A. Almond, "Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik," *Perbandingan Sistem Politik*, Editor Drs. Mochtar Mas'ood & Dr. Colin MacAnrews. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978), hlm. 44.

di masa mendatang dilaksanakan dengan memperhitungkan perbedaan golongan usia yaitu kaum muda, dewasa, dan tua karena setiap golongan usia punya karakter individu dan sosial yang berbeda satu sama lain.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Alfian. *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1981.
- Almond, Gabriel A. "Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik," *Perbandingan Sistem Politik*, dalam Mochtar Mas'ood & Dr. Colin MacAndrews. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1978.
- Asy'arie. Musa. *Keluar dari Krisis*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam. 2001.
- Fairbank, John K..et.al. *East Asia Modernization Transformation*, Tokyo: Tuttle Company, Inc. 1965.
- Lubis. Mochtar. *Budaya, Masyarakat dan Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya. 1994.
- Pranarka, *Epistemologi Dasar: Suatu Pengantar*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. 1987.
- Widjojo. Muridan S. (ed). *Penakluk Regim Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1999 .

### Wawancara Mendalam

Wawancara dengan Syamsuddin Haris Peneliti Senior P2 Politik LIPI. Jakarta. 11 November 2016

### Dokumen

- Undang-Undang No. 17 tahun 2017 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD
- T A P /MPR/ NOMOR XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan TAP NOMOR II/MPR/1978

### Jurnal & Makalah

- Alvino, E. Fantini. "Artifact," "Sociofact, and Mentifact: a Sociocultural Framework," *New ways in Teaching Culture*, Alexandria: Teacher of English to Speak other languages, Inc. 1995
- Emil Salim. "Indonesian science Fund and Research Agenda." Makalah keynote speaker pada diskusi bertema Globalisasi di Jakarta. 2012.

Daszko, Marcia and Sheinberg Sheila. "Survival Is Optional: Only Leaders With New Knowledge Can Lead the Transformation." *Theory of Transformation FINAL to SHORT*. Article April (2005): 1-10

Dadang S. Anshori, "Kontruksi Identitas Budaya Ke-Indonesiaan dalam Wacana Buku Teks Sekolah Dasar, makalah, [http://ejournal.upi.edu/index.php/BS\\_JPBSP/article/viewFile/4479/pdf](http://ejournal.upi.edu/index.php/BS_JPBSP/article/viewFile/4479/pdf)," diakses pada 16 Mei 2017

Listiyono Santoso, "Penguatan Identitas ke-Indonesia-an: Mendayung di Antara Lokalisme dan Globalisme," makalah, [http://www.academia.edu/8509004/Penguatan\\_Identitas\\_ke-Indonesia-an\\_Mendayung\\_di\\_Antara\\_Lokalisme\\_dan\\_Globalisme](http://www.academia.edu/8509004/Penguatan_Identitas_ke-Indonesia-an_Mendayung_di_Antara_Lokalisme_dan_Globalisme), diakses pada 17 Mei 2017

Ruhayandi, "Meneguhkan Identitas Budaya Nasional," "20 Mei 2012, makalah [https://www.academia.edu/8915510/Meneguhkan\\_Identitas\\_Budaya\\_Nasional?auto=download](https://www.academia.edu/8915510/Meneguhkan_Identitas_Budaya_Nasional?auto=download), diakses pada 12 Juni 2017

### Internet

- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2016. "Pancasila hanya dapat diubah dengan cara makar." (<http://www.mpr.go.id/posts/pancasila-hanya-dapat-diubah-dengan-cara-makar>, diakses pada 24 Februari 2017
- BBC Indonesia, "Ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2016 terus membaik," [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160805\\_indonesia\\_ekonomi\\_q2](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160805_indonesia_ekonomi_q2), diakses pada 27 Februari 2017
- SEASite Indonesia. "Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak Terlupakan," 1998 [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis\\_ekonomi.htm](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/krisis_ekonomi.htm), diakses pada 20 Februari 2017
- Niken Widya Yunita, , "Ketua MPR Bicara Soal Pancasila yang Mulai Ditinggalkan," 29 April 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3487755/ketua-mpr-bicara-soal-pancasila-yang-mulai-ditinggalkan>, diakses pada 20 Mei 2017.

## TENTANG PENULIS

### **Aisah Putri Budiatri**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui [aisahputrib@gmail.com](mailto:aisahputrib@gmail.com).

### **Wasisto Raharjo Jati**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2012, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi tentang Politik Kelas, Kelas Menengah, Ekonomi-Politik, dan Gerakan Politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: [wasisto.raharjo.jati@gmail.com](mailto:wasisto.raharjo.jati@gmail.com)

### **Dina Fadiyah**

Penulis adalah staf pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Telah menyelesaikan S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Email: [dinafadiyah@hotmail.com](mailto:dinafadiyah@hotmail.com)

### **Septi Satriani**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Lokal, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia memperoleh Gelar Sarjana dari Ilmu Politik Universitas Gajah Mada pada tahun 1999 dan Gelar Master dari Ilmu Antropoloti Universitas Gajah Mada pada tahun 2015. Ia menekuni studi politik lokal, politik sumber daya alam, dan studi konflik. Penulis dapat dihubungi melalui: [septisatriani@gmail.com](mailto:septisatriani@gmail.com).

### **Siswanto**

Penulis kelahiran Jakarta ini menamatkan S1 pada Fakultas Sospol jurusan Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 1986. Selanjutnya mengikuti Program Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, dan lulus tahun 1997. Gelar doctor diraih pada Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, pada tahun 2008. Sejak 1999 menjadi peneliti P2P-LIPI untuk menjabat Kepala Bidang Perkembangan Eropa. Sebagian besar karya ilmiah dan tulisannya membahas tentang kebijakan luar negeri AS dan hubungan Indonesia-AS. Sejak tahun 2008 sampai sekarang menjadi dosen tamu pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui [sish\\_jakarta@yahoo.com](mailto:sish_jakarta@yahoo.com).

### **Sandy Nur Ikfal Raharjo**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Indonesia. Gelar S2 diperoleh dari Universitas Pertahanan dengan tema Resolusi Konflik. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: [sandy.raharjo@gmail.com](mailto:sandy.raharjo@gmail.com).

### **Anggi Afriansyah**

Lahir di Bekasi, 17 April 1987. Setelah menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta (2010), ia kemudian melanjutkan studi di Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia (2014). Pernah menjadi guru di SMAI Al Izhari, Pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Terbuka, Akademi Kebidanan Prima Indonesia, dan STKIP Kusuma Negara, juga pernah menjadi staf di Unit Implementasi Kurikulum (UIK) Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Saat ini merupakan Peneliti Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Anggi Afriansyah memiliki fokus kajian sosiologi pendidikan. Aktif menulis di media cetak maupun *online*. Beberapa tulisannya sudah dimuat di Koran Berita Cianjur, Jawa Pos, Koran Jakarta, Media Indonesia, Harian Republika, Lampung *Post*, Radar Bangka, Radar Tasikmalaya, Padang Ekspres, NU Online, dan [gusdurian.net](http://gusdurian.net). Dapat dihubungi melalui [afriansyah.anggi@gmail.com](mailto:afriansyah.anggi@gmail.com).

## PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

### JUDUL

#### Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

*Abstract: Abstract in English (max. 150 words)*

*Keywords: 4 – 5 words/ phrase*

**Abstrak:** Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

**Kata Kunci:** 4 – 5 kata/ frasa

#### Pendahuluan

#### Pembahasan

#### Penutup

#### Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

## **JUDUL**

### **Penulis**

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

**Abstrak:** Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

**Kata Kunci:** 4 – 5 kata/ frasa

### **Pendahuluan**

### **Pembahasan**

### **Penutup**

### **Daftar Pustaka**

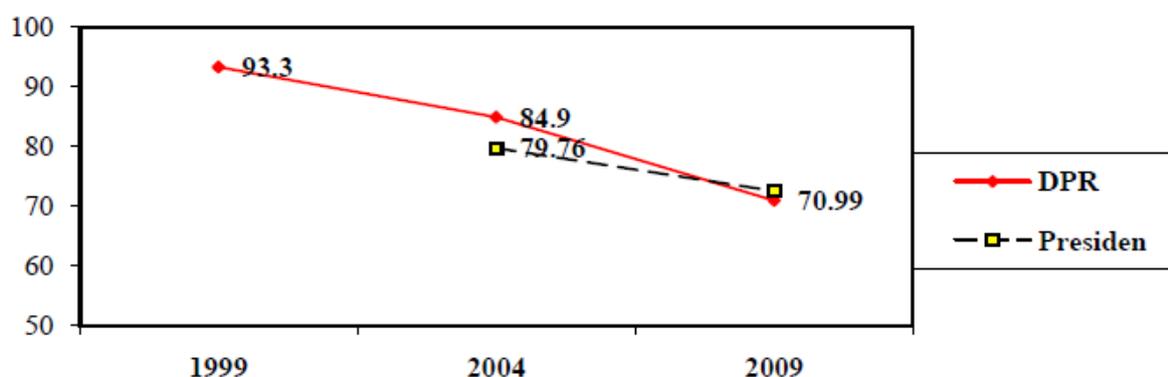
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
  - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
  - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
  - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

**Tabel 1.** Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah Sosialisasi agenda politik	Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**Grafik 2.** Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:  
Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
  - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:  
Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
  - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:  
Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan. 2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M. Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

**c. Format rujukan dari laporan dan makalah:**

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institute.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

**d. Format rujukan dari surat kabar dan website**

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

**11. Pengiriman Artikel:**

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi ([penerbitan.p2p@gmail.com](mailto:penerbitan.p2p@gmail.com)).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

**12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:**

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Fax. (021) 520 7118

**13. Langganan:**

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

